

Strategi Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota

Irsat¹, Barri M. Ronsumbre², Hamjah Bonso³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP YAPIS Biak, Indonesia.

Abstrak

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu apa yang telah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan BUMDes di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kampung sebagai Regulator sudah efektif peraturan mengembangkan Bumdes. Pemerintah Kampung Karyendi sebagai Dinamisator belum efektif karena sebelum Bumdes dibentuk peran Aparat kampung Karyendi lamban untuk tidak musyawarahkan serta tidak disosialisasikan terlebih dahulu terhadap masyarakat Kampung Karyendi tentang badan usaha milik kampung (BUMKAM) sehingga kurangnya perhatian partisipasi masyarakat, belum mempunyai tujuan yang jelas, dan tidak mempunyai strategi keberhasilan yang jelas.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah, BUMDES.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen Pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran nyata yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu badan usaha milik desa yang sesuai PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha kegiatan ekonomi masyarakat

pedesaan. Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha.

Pembentukan Bumdes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan Kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa,

terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Agustang et al., 2021). Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan Bumdes dikarenakan kurang siapnya dan potensi yang minim dari desa (Mafaza & Setyowati, 2020).

Pada hakikatnya Bumdes bukan merupakan hal yang baru, bumdes telah ada dan diatur dalam peraturan perundang undang terkait desa atau pemerintah daerah sebelum UUD Desa terbit pada tahun 2014, Bumdes telah diatur dalam pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang dengan Nomor 23 Tahun 2014 yakni Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Namun Pada Implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia Hingga dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Utami et al., 2020).

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, kompehesif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu apa yang telah terjadi (Iriawan & Edyanto, 2023). Peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bahan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan (Lopulalan, 2018).

Latar belakang masalah yang terjadi di Kampung Karyendi adalah Selama berdirinya Kampung Karyendi. Penyebab utama Kurangnya Peran Aparatur Kampung memprioritaskan Badan usaha Milik Desa . Sehingga Kegiatan pembangunan ekonomi yang berasal dari Kampung melalui BUMDes belum direalisasikan. Sebagai penggerak ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul. “Strategi Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Bumdes di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota”.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor dan Wilayah Pemerintahan Kampung Karyendi Distrik Biak Kota mengenai Strategi dan Peran Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan BUMDes.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif untuk memberi pemahaman-pemahaman kepada masyarakat dan memberikan usulan dan alasan kepada Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan untuk mengetahui informasi yang akan diteliti, data

primer bertujuan untuk memperkaya dan mempertajam penelitian sebagai kesimpulan. Pengumpulan Data primer dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara tidak terstruktur dan bersifat terbuka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempertegas dan mempertajam informasi yang mendukung data primer serta memperjelas fenomena yang peneliti lakukan sesuai judul penelitian. Data sekunder juga diperoleh dengan cara menelaah dokumen resmi, data proses pelaksanaan program, dan data lain tertulis yang relevan dengan penelitian. Data yang dimaksud yaitu:

2. Sumber data

Informan yaitu untuk menyampaikan pandangan dan pendapat informan tentang penelitian. Adapun sumber dalam penelitian ini untuk mencari informasi dan data tentang Strategi dan Peran Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Bumdes Di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota berjumlah 4 orang dan 1 Data

Monografi Kampung yang menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan peneliti melakukan tanya jawab dengan informan. Sebagai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan studi kasus, untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terkait Strategi Pemerintah Kampung dalam pengelolaan BUMDes Di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota dengan melakukan tanya jawab langsung atau bertatap muka (*face to face*) antara peneliti dan informan peneliti

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota terkait dengan Strategi Dan Peran Pemerintah Kampung dalam

Pengelolaan BUMDES. Fungsi observasi atau pengamatan ini adalah untuk mendapatkan data langsung yang mungkin tidak di peroleh melalui wawancara maupun dokumentasi.

3. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti wawancara, observasi, kutipan, sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tipe; terlihat lebih banyak berupa kata daripada angka. Oleh Karena itu, data tersebut harus 'diproses' dan dianalisis sebelum dapat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulator

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Kepala Kampung Karyendi terkait dengan kegiatan pelaksanaan BUMdes adalah sebagai berikut :

“.....baik jadi di kampung karyendi ini Bumkam masih baru, bumdes ini baru saja dibentuk tanggal 22 februari kemarin, itu pas hasil dari musrenbang tingkat distrik, kalau mau dibilang kegiatan Bumkam ini ada dapat modal awal dari Bpk. Bupati, dalam bentuk ayam 100 ekor, namanya Ayam petelor. kira - kira strategi yang pertama itu Bapa akan jalankan itu membuat iuran dulu untuk aparat dorang untuk sementara sebagai penunjang bumkam dulu,karena baru saja dibentuk makanya belum ada dana untuk bikin sebuah usaha, jadi nanti ketika dana kampung bulan agustus cair baru dari dana kampung dipakai untuk mengganti aparat punya uang - uang yang pemerintah kampung pinjam”.

Sesuai dengan uraian informan diatas, dijelaskan secara singkat bahwa BUMmnu di Kampung Karyendi di bentuk oleh Bupati Biak Numfor melalui Musrenbang tingkat Distrik se-Biak Kota pada tanggal 22 februari

2022, strategi awal Bapak Kepala Kampung, Karyendi adalah membuat iuran wajib kepada Aparatur Kampung. Dikarenakan dari Pemerintah Kabupaten belum menganggarkan berapa persen Dana untuk penggunaan dan pengelolaan BUMmnu untuk mencapai keberhasilan. Sehingga Aparat Kampung Karyendi wajib mematuhi Regulasi dari Bapak Kepala Kampung. Sebagai titik awal kegiatan BUMDes Awin Kampung Karyendi. Sesuai dengan hasil wawancara, tanggapan peneliti terkait jawaban wawancara Bapak Kepala Kampung adalah langkah awal yang sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk menunjang langkah awal untuk mengembangkan BUMmnu di kampung karyendi Distrik Biak Kota

B. Dinamisator

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Penasehat BUMDes Awin selaku Kepala Kampung Karyendi terkait bimbingan pengurus BUMDes Awin adalah sebagai berikut :

“jadi, ada dua hal yang menjadi kendala yang di hadapi BUM kampung Awin ini yang pertama BUMkampung baru saja dibentuk, untuk itu sulit mengadakan bimbingan khusus untuk anggota BUMkampung, dan yang kedua yaitu keterbatasan Dana membuat kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi menjadi terhambat.”

Tanggapan peneliti, untuk mempermudah kedua hal tersebut adalah perlu membuat permohonan atau menyurati bagian pemerintah kabupaten yang mengurus bagian BUM kampung ini sehingga kegiatan – kegiatan mengembangkan BUMMnu bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sekretaris Kampung tentang meningkatkan minat masyarakat terhadap BUMMnu Awin adalah sebagai berikut :

“.....oh baik, jadi begini dari Aparat Kampung dan Bamuskam sudah memberikan usulan kepada Bapak Kepala Kampung untuk mensosialisasikan Organisasi yang baru di kampung karyendi kepada seluruh masyarakat kampung karyendi, namun jawaban Bapak Kepala Kampung semua bisa dilakukan hanya keterbatasan Dana,jadi

caranya untuk mengatasi itu Bapak Kepala Kampung Memberi Perintah untuk setiap ketua dusun supaya memberitakan kepada masyarakat yang di wilayahnya, untuk segera ikut serta dan memberi dukungan terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah kampung karyendi dalam menyikapi organisasi BUM kampung ini.”

Sesuai uraian wawancara terhadap sekretaris kampung,tanggapan peniliti dengan kata lain Strategi dan Peran Aparatur Kampung dalam hal ini BUMmnu sudah sangat tepat, terutama Strategi dan Peran yang dijalankan Bapak Kepala Kampung sudah diharuskan, karena sesuai dengan misi Bapak Kepala Kampung yaitu Mewujudkan pelayanan yang professional melalui tata kelola Pemerintahan Desa yang responsif, akuntabel, dan transparan.

C. Fasilitator

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Kepala Kampung Karyendi mengenai fasilitas berupa dana adalah sebagai berikut :

“.....selain fasilitas dana yang sangat terbatas, Pemerintah Kampung hanya bisa

memfasilitasi bangunan berupa sekretariat sementara, berlokasi di Kantor Kampung Karyendi. Dengan memakai Salah satu ruangan kerja kantor Kampung Karyendi”.

Tanggapan peneliti, secara sederhana Pemerintah Kampung sangat berperan besar dalam menunjang keberlangsungan roda organisasi BUM kampung ini dengan kata lain, Peran Kepala Kampung sangat besar Demi menciptakan kegiatan ekonomi dan menghasilkan Penghasilan Asli Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Pendamping Kampung Distrik Biak Kota terkait pendampingan terhadap pengelola adalah sebagai berikut :

“.....tidak di Distrik Biak Kota, antara pengurus BUMmnu saja dengan masyarakatnya di kampung. Pendamping Distrik tidak harus mendampingi. Kalau kami itu tugasnya yang pertama bagaimana BUM Kampung bisa dibentuk oleh kampung, melengkapi kelengkapan keperluan administrasi BUM Kampung, membimbing pengurus BUM kampung dalam hal pembukuan keuangan, memotivasi, dan memfasilitasi pengurus untuk

mengembangkan BUM Kampungnya”.

Sesuai dengan uraian penjelasan di atas menjelaskan bahwa tugas pendamping kampung hanya mendampingi kelengkapan berkas seperti kelengkapan administrasi, membimbing pengurus BUM Kampung dalam hal pengurusan LPJ (laporan pertanggung jawaban), memberi motivasi dan memfasilitasi pengurus untuk mengembangkan BUM kampungnya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan akhir tentang Strategi Dan Peran Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) di Kampung Karyendi Distrik Biak Kota, menurut peneliti belum efektif, dilihat dari beberapa indikator adalah sebagai berikut

- a. Pemerintah Kampung sebagai Regulator sudah efektif peraturan mengembangkan Bumdes.
- b. Pemerintah Kampung Karyendi sebagai Dinamisator belum efektif karena sebelum Bumdes dibentuk

peran Aparat kampung Karyendi lamban untuk tidak musyawarahkan serta tidak disosialisasikan terlebih dahulu terhadap masyarakat Kampung Karyendi tentang badan usaha milik kampung (BUMKAM) sehingga kurangnya perhatian partisipasi masyarakat, belum mempunyai tujuan yang jelas, dan tidak mempunyai strategi keberhasilan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang, A., Adam, A., & Upe, A. (2021). Community Empowerment Strategy towards a Sustainable Rural Community-based Tourism Village. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, 12(3), 2065–2076. www.desabira.com,
- Iriawan, H., & Edyanto. (2023). Strategy for Empowering Indigenous Papuan Fishermen in the Implementation of Papua's Special Autonomy Law. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45852>
- Lopulalan, J. E. (2018). Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 37–49. <https://doi.org/10.21831/socia.v15i1.20801>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7.